



### Peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS) Dalam Pendidikan Perspektif Gender Menuju Indonesia Emas 2045

Aida Maqbulah<sup>1</sup> Syafruddin<sup>2</sup> Pipin Yosepin<sup>3</sup>

STAI Al-Aqidah Al-Hasyimiyyah Jakarta<sup>1,2,3</sup>

Jl KayuManis Barat No. 99 Jakarta Timur

[aidahasyim723@gmail.com](mailto:aidahasyim723@gmail.com)<sup>1</sup> [abunasywal72@gmail.com](mailto:abunasywal72@gmail.com)<sup>2</sup>

[pipin.nurjannah@gmail.com](mailto:pipin.nurjannah@gmail.com)<sup>3</sup>

#### ABSTRAK

Penulisan ini mengulas peran Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS) dalam pendidikan perspektif gender sebagai komponen utama menuju Indonesia Emas 2045. Pendidikan gender melibatkan pemahaman tentang peran gender dan hak asasi manusia. PTKIS memiliki tanggung jawab untuk mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan pendidikan gender, membentuk pemimpin yang sadar akan kesetaraan gender, dan mampu mengatasi tantangan sosial yang rumit. PTKIS dapat memainkan peran utama dalam mengatasi hal ini. Dengan memahami konsep pendidikan gender, mengintegrasikannya dalam kurikulum, serta melibatkan dosen dalam penyampaian materi gender, PTKIS dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan beradab. Melalui kebijakan inklusifitas gender, pencegahan kekerasan berbasis gender, dan partisipasi aktif mahasiswa dalam kesetaraan gender, PTKIS memiliki potensi untuk membentuk masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berdaya saing, sesuai dengan visi Indonesia Emas 2045 yang mencerminkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kemajuan yang berkelanjutan.

**Kata Kunci :** Peran, PTKIS, Pendidikan, Gender, Indonesia, Emas

#### ABSTRACT

*This paper reviews the role of Islamic Higher Education Institutions (HEIs) in gender perspective education as a key component towards Indonesia Emas 2045. Gender education involves an understanding of gender roles and human rights. HEIs have a responsibility to integrate religious values with gender education, shaping leaders who are aware of gender equality, and able to address complex social challenges. HEIs can play a major role in addressing this. By understanding the concept of gender education, integrating it in the curriculum, and involving lecturers in the delivery of gender materials, PTKIS can create an inclusive and civilised educational environment. Through gender inclusivity policies, prevention of gender-based violence, and active student participation in gender equality, PTKIS has the potential to shape a more inclusive, just, and competitive society, in accordance with the vision of Indonesia Emas 2045 that reflects the values of justice, equality, and sustainable progress.*

**Keywords:** Role, PTKIS, Education, Gender, Indonesia, Gold



## PENDAHULUAN

Pendidikan gender menjadi aspek krusial dalam pembangunan suatu negara, terutama dalam mencapai visi Indonesia Emas 2045 yang mengedepankan kesetaraan dan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Namun, dalam perjalanan menuju tujuan tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi, khususnya dalam konteks Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKIS) di Indonesia.

Beberapa permasalahan yang memperjelas urgensi peran PTKIS dalam pendidikan perspektif gender, yaitu pertama, keterbatasan kesadaran gender dalam pendidikan keagamaan. Dalam hal ini PTKIS memiliki peran sentral dalam mendidik generasi muda dengan nilai-nilai agama dan moral. Namun, sering kali konsep gender masih kurang ditekankan dalam konteks pendidikan keagamaan. Hal ini bisa mengakibatkan pemahaman yang terbatas mengenai pentingnya kesetaraan gender dalam ajaran agama. Kedua, Patriarki dalam Lingkungan Pendidikan Islam: Tradisi patriarki yang kadang-kadang melekat dalam lingkungan pendidikan Islam bisa membatasi peran perempuan dalam mendapatkan akses yang sama terhadap ilmu pengetahuan dan kepemimpinan. Diperlukan upaya untuk merangkul perspektif gender yang inklusif dan progresif dalam lingkungan PTKIS. Ketiga, adanya kesenjangan gender dalam akses dan partisipasi. Kendala ekonomi, sosial, dan budaya masih mempengaruhi akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan tinggi, termasuk di PTKIS. Hal ini mengakibatkan kesenjangan gender dalam jumlah mahasiswa dan dosen perempuan dibandingkan dengan laki-laki. Ketiga, kurangnya integrasi gender dalam kurikulum. Walaupun upaya telah dilakukan untuk mengintegrasikan pendidikan gender dalam kurikulum PTKIS, namun sering kali hal ini masih bersifat terpisah dan kurang terintegrasi secara menyeluruh dalam seluruh mata kuliah dan program studi. Kurikulum yang belum mencerminkan nilai-nilai kesetaraan gender dapat menghambat pembentukan pemikiran kritis tentang isu-isu gender. Keempat adanya peran dosen dalam penyampaian materi gender.

Peran dosen sangat penting dalam membentuk persepsi mahasiswa tentang isu-isu gender. Namun, jika dosen belum memahami sepenuhnya konsep gender atau tidak mampu menyampaikan materi dengan baik, dampak positif dari pendidikan gender dapat terhambat. Kelima, ketidaktoleranan terhadap keberagaman gender. Lingkungan kampus yang kurang toleran terhadap berbagai identitas gender dan orientasi seksual bisa menjadi hambatan dalam menciptakan suasana belajar yang inklusif dan aman bagi semua individu.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan ini, PTKIS memiliki potensi untuk memainkan peran penting dalam memperkuat pendidikan gender, mengubah paradigma budaya patriarki, dan membentuk generasi yang lebih sadar gender, yang pada gilirannya akan memberi sumbangan signifikan bagi pencapaian Indonesia Emas 2045.

## METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Pencarian sumber data dalam penelitian ini diakses melalui berbagai database elektronik seperti google scholar, scopus, resarchgate, sciencedirect, ERIC dan lain-lain. Ada beberapa kata kunci yang digunakan dalam pencarian data yaitu gender,

*Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*



[Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)

kesetaraan gender, ketidaksetaraan gender, pengarusutamaan gender dan pendidikan tinggi (gender, gender equality, gender inequality, gender mainstreaming, higher education). Selanjutnya dari data yang diperoleh tersebut di reduksi lalu di analisis dan disimpulkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pendidikan Gender dan Konsep Teori Gender

Pendidikan gender terdiri atas dua suku kata, yaitu pendidikan dan gender. Menurut Definisi pendidikan secara luas bisa dilihat dari beberapa definisi berikut. Menurut Draf UU Nomor 20 Tahun 2003, Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara<sup>1</sup>. Syaefudin Achmad (2019), mengacu pada Endang Hangestinisngsih, mengidentifikasi konsepsi dasar pendidikan yang mencakup: pertama, pendidikan seumur hidup; Kedua, tanggung jawab bersama keluarga, masyarakat, dan pemerintah; Ketiga, pendidikan sebagai keharusan, membentuk kemampuan dan kepribadian manusia.<sup>2</sup>

Menurut Syaefudin Achmad (2019), John M. Echols dan Hassan Shadily mendefinisikan gender sebagai jenis kelamin. Muhammad Zawil Kiram (2020), dengan mengutip West and Zimmerman, membedakan gender dari sex meskipun keduanya berasal dari istilah yang sama, yaitu jenis kelamin. Sex mengacu pada perbedaan anatomi biologis antara laki-laki dan perempuan, sedangkan gender lebih terkait dengan dimensi sosial, budaya, dan aspek non-biologis lainnya. Gender tidaklah bawaan sejak lahir, melainkan suatu peran yang dijalankan dalam kehidupan.<sup>3</sup> Musdah Mulia dalam pendapatnya mengatakan bahwa gender adalah seperangkat sikap, peran, tanggungjawab, fungsi, hak, dan perilaku yang melekat pada diri laki-laki dan Perempuan akibat bentukan budaya atau lingkungan masyarakat tempat manusia itu tumbuh dan dibesarkan.<sup>4</sup> Dalam hal ini pengertian gender merujuk pada sifat dan ciri khas yang dimiliki laki-laki dan perempuan bukan sebatas pada perbedaan biologis semata. Dalam pemaknaannya yang lebih jauh istilah gender merujuk pada peran dan hubungan antara laki-laki dan Perempuan.

Menurut Mansour Fakhri perbedaan gender sebenarnya tidak menjadi masalah sepanjang tidak melahirkan ketidakadilan gender. Masalah itu akan muncul ketika perbedaan gender melahirkan berbagai ketidakadilan, terutama bagi kaum perempuan. Dalam memahami keadilan gender perlu dilihat manifestasi untuk melihat penyebab ketidakadilan pada gender. Manifestasi ketidakadilan gender tidak dapat dipisah-

---

<sup>1</sup> Kementerian Pendidikan dan kebudayaan, Draf UU Nomor 20 Tahun 2003

<sup>2</sup> Syaefudin Achmad, (2019), *Membangun Pendidikan Berwawasan Gender* Jurnal YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak, Vol. 14 Nomor 1 2019, hlm 70-91

<sup>3</sup> Muhammad Zawil Kiram (2020), *Pendidikan Berbasis Gender Dalam Keluarga Masyarakat Aceh*, Jurnal Community Pengawas Dinamika Sosial, Vol. 6 No. 2, hlm. 180-191

<sup>4</sup> Rizki Amalia, penerapan Konseling Eksistensial Humanistic Berbasis Nilai Budaya Minangkabau Dalam Kesetaraan Gender Untuk Meningkatkan Self Esteem Pada Remaja, Jurnal Bimbingan Konseling Ar Rahman, Vol.2 No.2, 2016, h.10.



pisahkan karena saling berkaitan dan saling mempengaruhi secara dialektis dan dapat dilihat dalam bentuk marginalisasi, subordinasi, stereotip, kekerasan (violence) dan beban kerja.<sup>5</sup>

Menurut teori equilibrium, dikutip dalam buku Gender dan Wanita Karir yang ditulis Dr. Dra Alifiulathin Utaminingsih, M. Si menyebutkan bahwa teori ini berbeda dengan teori gender sebelumnya yang bersifat kompromistis atau menjembatani pemahaman para penganutnya. Namun teori ini lebih menekankan pada konsep kemitraan atau keharmonisan dalam hubungan atau relasi antara perempuan dan laki-laki. Teori equilibrium merupakan teori yang menjelaskan realias relasi antara laki-laki dan Perempuan (relasi gender) secara seimbang yang merupakan paha kompromistis yang dikenal dengan keseimbangan (equilibrium). Pandangan ini tidak mempertentangkan antara relasi kaum perempuan dan laki-laki. Pandangan tersebut tidak mempertentangkan antara relasi kaum Perempuan dan laki-laki karena keduanya harus bekerjasama dalam kemitraan dan keharmonisan relasi gender dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Hubungan keduanya membentuk pola hubungan komplementer guna saling melengkapi satu sama lain, dengan kata lain saling memahami kelebihan maupun kekurangan serta mendukung aktualisasi potensi masing-masing.<sup>6</sup>

Dengan demikian, dalam hubungannya dengan pendidikan gender Islami yaitu berupaya menciptakan keseimbangan aktivitas sosial antara laki-laki dan perempuan sesuai dengan al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Pendekatan ini menekankan keadilan, menghindari merugikan, merendahkan, atau menghasilkan hipotesis negatif yang dapat menyakiti baik laki-laki maupun perempuan. Pendidikan gender Islami bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan bersama secara saling menguntungkan.<sup>7</sup>

Menurut Syarifah Rahmah dengan mengutip Fakhri, laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang setara dalam pendidikan yang mendorong kreativitas. Kreativitas seseorang secara umum dinilai melalui: pertama, kemampuan kognitif, termasuk kecerdasan dan ide-ide baru; kedua, sikap terbuka, penerimaan gagasan dari luar, dorongan untuk belajar dan berkembang; Ketiga, keyakinan diri, optimisme, ketahanan terhadap provokasi dan hoaks; Keempat, kerja sama dengan pihak terkait; Kelima, pembuatan ide-ide inovatif; Keenam, ketekunan menghadapi kegagalan sebagai langkah menuju kesuksesan.<sup>8</sup>

### **Pentingnya Pendidikan Gender dalam Pembangunan Negara**

Pendidikan gender adalah kunci untuk mencapai kesetaraan gender dan transformasi sosial inklusif. Ini memberi perempuan akses setara terhadap pendidikan,

---

<sup>5</sup> Mansour Fakhri, *Analisis Gender & Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: PustakaPelajar, 2013), h.10.

<sup>6</sup> Alifiulathin Utaminingsih, *Gender dan Wanita Karir*, (Malang: UB Perss, 2017), h. 20-26

<sup>7</sup> Shabri Shaleh Anwar, Said Maskur, Sudirman Anwar, *Pendidikan Gender dalam Pandang Islam*, jkt : PT Indragiri Dot Com, hlm. 4

<sup>8</sup> Syarifah Rahmah (2019), *Pendidikan dan Kesetaraan Gender dalam Islam di Aceh*, Gender Equality International Journal Of Child And Gender Studies, hlm. 25-42

*Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*



pemberdayaan ekonomi, serta pencegahan kekerasan gender. Dengan menghapus stereotip gender, menciptakan lingkungan inklusif, dan meningkatkan pemahaman hak asasi manusia, pendidikan gender membentuk masyarakat adil, budaya, dan berkelanjutan. Ini juga mendukung pengambilan keputusan bijaksana dan tujuan pembangunan berkelanjutan. Kesimpulannya, pendidikan gender adalah dasar penting bagi perkembangan individu, masyarakat, dan negara yang lebih baik. Mengacu pada prinsip pembelajaran dalam kurikulum gender, seperti diungkapkan oleh Khusnul Khotimah (2008) dalam jurnal "INSANIA," penting untuk memahami peran vital pendidikan gender dalam pembangunan negara, antara lain: pertama kesiapan pendidik dalam kemampuan berwacana gender, kedua, sikap pendidik adalah harus adil dan setara dalam memberlakukan peserta didik, laki-laki maupun perempuan perlu mendapat tugas dan kesempatan yang sama untuk berkembang. Ketiga, tidak mengajari atau menggurui. Keempat, terbuka. Kelima, Menggunakan pendekatan holistik dan dialog.<sup>9</sup>

### **Tantangan Gender dalam Pendidikan di Indonesia**

Meskipun ada kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender dalam pendidikan di Indonesia, masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi: Pertama, akses tidak merata. Beberapa daerah, terutama di wilayah pedalaman dan terpencil, menghadapi kesulitan dalam memberikan akses pendidikan yang setara bagi perempuan. Hal ini disebabkan oleh faktor geografis, sosial, dan ekonomi. Kedua, stereotip gender. Stereotip gender yang masih kuat di masyarakat dapat mempengaruhi pilihan pendidikan dan karir, terutama bagi perempuan. Pilihan yang terbatas ini bisa menghambat perkembangan mereka di bidang-bidang tertentu.

Ketiga, kurikulum dan materi tidak merata: Kurikulum yang tidak sepenuhnya mencerminkan perspektif gender dapat mengabaikan kontribusi perempuan dalam sejarah, sains, dan bidang lainnya. Ini dapat memperkuat ketidaksetaraan gender dalam pendidikan. Keempat, pelecehan dan kekerasan berbasis gender. Kekerasan dan pelecehan berbasis gender di lingkungan pendidikan, termasuk seksisme, pelecehan seksual, dan intimidasi, dapat menghambat partisipasi dan kesejahteraan siswa. Kelima, kurangnya guru berpendidikan gender. Guru yang tidak memahami konsep gender mungkin kurang mampu menghadapi isu-isu gender di dalam kelas dan kurang memahami perlunya pendidikan gender.

Keenam, kurangnya partisipasi perempuan dalam posisi pimpinan. Kurangnya perempuan dalam posisi kepemimpinan di dunia pendidikan bisa mengurangi peran model perempuan yang menginspirasi dan merugikan perkembangan kesetaraan gender. Ketujuh, adanya pengaruh norma budaya. Norma budaya dan tradisi patriarki masih mempengaruhi persepsi masyarakat tentang peran gender. Ini dapat mempengaruhi ekspektasi terhadap perempuan dan laki-laki dalam pendidikan dan masyarakat. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, dibutuhkan upaya lintas sektor, termasuk pendidikan formal, pelatihan guru, serta kampanye kesadaran gender di masyarakat. Pendidikan gender yang kuat dan kurikulum inklusif dapat membantu mengatasi hambatan-hambatan

---

<sup>9</sup> Khusnul Khotimah (2008), Urgensi Kurikulum Gender dalam Pendidikan *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan*, Vol. 13 No. 3, hlm. 1-10



ini dan mendorong kesetaraan gender yang lebih besar di dalam sistem pendidikan Indonesia.

### **Peran Ptkis Dalam Pendidikan Perspektif Gender**

Perguruan Tinggi agama Islam Swasta (PTKIS) sebagai lembaga tinggi yang paling *advance* memandang berbagai kajian mengenai problema hidup manusia dapat dijalankan secara lebih intensif dan serius, terutama terkait dengan persoalan pembangunan masyarakat dan persoalan gender sebagai salah satu persoalan yang saat ini dipandang perlu sebagai kajian intensif.<sup>10</sup> Dalam hal ini berbagai perguruan tinggi PTKIS memiliki peran dalam kajian mengenai gender. Kajian tersebut selain konsep-konsep, dalam implementasi kehidupan juga diterapkan.

Masalah gender adalah persoalan pembangunan persoalan masyarakat dan persoalan yang dipandang perlu oleh agama Islam sebagaimana yang dikemukakan di atas. Kajian konsep meliputi: Pertama, pencarian berbagai konsep mengenai gender teknologi sosial maupun dalam kaitan peranannya dalam pembangunan kajian tersebut dilakukan antara lain dari berbagai seminar diskusi dengan berbagai pertemuan. Selain itu dalam berbagai penelitian baik yang dilakukan oleh dosen maupun mahasiswa dalam menyusun skripsi mereka ketiga dalam berbagai mata kuliah yang menyinggung wanita misalnya fiqih, pemikiran modern dalam Islam, Pendidikan Islam dan lain-lain telah dilakukan kajian yang mendalam mengenai wanita.<sup>11</sup> Kedua, kajian-kajian mengenai gender telah dilakukan dalam bentuk pendirian lembaga pengkajian mengenai perempuan. Salah satu contoh yang dapat dikemukakan adalah pusat kajian wanita yang telah terbentuk di seluruh PTKIS di berbagai perguruan tinggi Islam di Indonesia.

Kajian-kajian gender PTKIS tersebut diharapkan dapat berfungsi ganda yaitu pertama, menjadi upaya untuk pengembangan pengkajian terhadap perempuan dan peranannya dalam perkembangan masyarakat. Kedua menjadi pembimbing bagi berbagai kajian terhadap perempuan baik yang dilakukan secara kelembagaan maupun perorangan agar tetap berjalan di atas nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai dengan agama dan jati diri bangsa tidak terjerumus pada konsep-konsep dan pandangan sekuler mengenai perempuan. Kedua menjadi pembimbing bagi berbagai kajian terhadap perempuan baik yang dilakukan secara kelembagaan maupun perorangan agar tetap berjalan di atas nilai-nilai dan norma-norma yang sesuai dengan agama dan jati diri bangsa tidak terjerumus pada konsep-konsep dan pandangan sekuler mengenai perempuan.<sup>12</sup>

Dalam Workshop Penguatan Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) di Perguruan Tinggi untuk Penerapan Perguruan Tinggi yang Responsif Gender yang diselenggarakan pada 4 – 6 Desember 2019 di Depok,

---

<sup>10</sup> Mulyono, Kajian Gender di Perguruan Tinggi Agama Islam, *Jurnal Egalita* Vol1, No.2, 2006.

<sup>11</sup> Chalijah Hasan, *Kajian Gender dan Perguruan Tinggi, dalam Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi*, Syahrian Harahap (Ed.), IAIN Sumatera Utara Bekerjasama dengan Tiara Wacana Yogya, 1998, hlm. 193-194.

<sup>12</sup> Chalijah Hasan, *Kajian Gender dan Perguruan Tinggi, dalam Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi*, Syahrian Harahap (Ed.), IAIN Sumatera Utara Bekerjasama dengan Tiara Wacana Yogya, 1998, 193-194.



Agustina menjelaskan bahwa pentingnya peran para Akademisi dan Lembaga Riset dalam pengarusutamaan gender sangat diperlukan agar seluruh sivitas Perguruan Tinggi dapat menjadi perpanjangan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam menjangkau masyarakat luas, terutama melibatkan mahasiswa sebagai agen perubahan serta penerapan Tridharma Perguruan Tinggi dan manajemen kampus yang responsif gender oleh jajaran pimpinan Perguruan Tinggi. Bila kesetaraan gender dapat diwujudkan di Perguruan Tinggi, kesempatan perempuan sebagai pembuat keputusan dan menempati posisi strategis di kampus semakin meningkat dan terhapusnya kekerasan dalam kampus secara tuntas. "Isu gender di kampus masih banyak mulai dari pelecehan hingga kekerasan seksual, sehingga peran seluruh elemen kampus sangat dibutuhkan untuk menuntaskannya secara maksimal dan serius, terutama melibatkan laki-laki agar lebih responsif terhadap isu-isu gender. Diharapkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Indonesia bisa merata peningkatannya.<sup>13</sup>

Pada peraturan di tingkat Perguruan Tinggi, Undang-Undang No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 6 poin (b) berbunyi bahwa Pendidikan Tinggi diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Kasubdit Pengakuan Kualifikasi, Direktorat Pembelajaran Mahasiswa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa pendidikan responsif gender adalah perlakuan dalam memberi kesempatan yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan. Perguruan Tinggi sedang mengusahakan adanya pengenalan materi tentang gender kepada para mahasiswa sejak awal memasuki kampus atau menyelipkan dalam mata kuliah khusus.<sup>14</sup>

Permasalahan terkait gender ada dalam setiap aspek kehidupan bermasyarakat, salah satunya adalah di dunia pendidikan tinggi. Menurut data yang dipublikasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, saat ini terdapat 4597 Perguruan Tinggi swasta dan negeri yang tersebar di seluruh Indonesia, baik itu yang berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, akademi, akademi komunitas maupun politeknik (Dikti, 2018). Perguruan Tinggi ini menaungi 8.400.877 orang mahasiswa dan 286.116 orang dosen. Mahasiswa terbagi menjadi mahasiswa laki-laki sebanyak 3.099.783 dan mahasiswa perempuan sebanyak 3.250.158.<sup>15</sup> Sedangkan untuk dosen, 286.116 orang ini terbagi menjadi 166.979 dosen berjenis kelamin laki-laki dan 129.021 dosen perempuan.<sup>16</sup>

Dalam hal ini perguruan tinggi dalam kesetaraan gender bukan berarti memberikan suatu hak spesial dan dispensasi khusus hanya untuk perempuan melainkan memberikan akses, partisipasi, control dan manfaat yang sama baik Perempuan maupun laki-laki. "Pendidikan responsif gender adalah perlakuan dalam memberi kesempatan

---

<sup>13</sup> Agustina Erni, Workshop Kemen PPPA *Rangkul Sivitas Perguruan Tinggi Wujudkan Kesetaraan Gender*, 7 Desember 2019, diakses tgl 14 Agustus 2023, 09.12 wib,

<sup>15</sup> Ika Arinia Indriyany, M. Dian Hikmawan, Wahyu Kartiko Utami, Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi tentang Urgensi Kampus Berperspektif Gender, *Dalam JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN*, Vol.6, No. 1, 2021, hlm.1.

<sup>16</sup> PDDIKTI Kemdikbud. (2020). Statistik PDDikti.

*Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*



yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh pendidikan. Perguruan Tinggi sedang mengusahakan adanya pengenalan materi tentang gender kepada para mahasiswa sejak awal memasuki kampus atau menyelipkan dalam mata kuliah khusus.

Menurut Susanto<sup>17</sup> dalam penelitiannya menemukan bahwa persoalan gender dalam mata kuliah ilmu sosial keagamaan (*civic education*, ISD, IBD) dan matakuliah keagamaan (fiqh, tafsir dan hadits). Meskipun pengkajian gender di STAIN Pamekasan masih sebatas dalam wujud wacana intelektual, dalam arti meski mengungkapkan problem ketimpangan gender dalam dinamika kehidupan sosial, tetapi tidak sampai pada hal-hal detail seperti pemilihan diksi, istilah dan hal-hal teknis lainnya. Namun demikian, sampai batas tertentu, mahasiswa telah mulai memahami dan mulai mampu membedakan antara problem sex dan gender, meskipun dalam tataran kulit luar dan belum mendalam.

Dalam konteks menciptakan pemahaman yang holistik tentang kesetaraan gender dan inklusivitas dalam kerangka agama dan budaya Islam PTKIS berperan penting dalam Pendidikan gender disebabkan untuk menghindari penafsiran yang salah. Dalam konteks ajaran Islam seringkali terjadi penafsiran yang salah atau diskriminatif terhadap isu-isu gender. PTKIS dapat berperan dalam mengajarkan interpretasi yang akurat dan menyeluruh tentang ajaran agama yang mendukung kesetaraan dan keadilan gender. Selain itu PTKIS dapat menjadi tempat dimana stereotip dan diskriminasi gender dapat diatasi melalui edukasi dan peningkatan pemahaman. Dengan mendidik mahasiswa tentang kesetaraan gender PTKIS dapat berkontribusi pada perubahan pandangan dan sikap yang lebih inklusif. PTKIS juga dapat memberikan dasar teologis yang kuat untuk mendukung kesetaraan gender dengan merujuk pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam yang mendorong perlakuan yang adil terhadap semua individu tanpa memandang gender.

### **Pemahaman Pendidikan Gender di PTKIS**

Dalam mewujudkan pendidikan adil gender komitmen pemerintah menuangkan berbagai macam regulasi salah satunya dengan peraturan menteri pendidikan Nomor 84 Tahun 2008, tentang pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Pada Permendiknas tersebut dinyatakan bahwa setiap satuan unit kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegrasikan gender di dalamnya. Berdasarkan pasal tersebut tidak ada lagi alasan bagi stakeholders pendidikan untuk mengabaikan integrasi keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan pendidikan.<sup>18</sup>

Pada kenyataannya kesenjangan gender bidang pendidikan masih terjadi. Beberapa kesenjangan gender yang ada antara lain: 1) materi bahan ajar pada umumnya masih bias gender. 2) proses pembelajaran di kelas belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif secara seimbang antara siswa laki-laki dan Perempuan. 3) lingkungan fisik sekolah belum menjawab kebutuhan spesifik anak laki-laki dan Perempuan. 4)

---

<sup>17</sup> Edi Susanto, Sensitivitas Gender Dalam Mata Kuliah Ilmu Sosial Keagamaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, Nuansa, *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial & Keagamaan* STAIN Pamekasan, Vol. II, No. 2 Juli-Desember 2006., hlm. 113-114.

<sup>18</sup> <https://psw.ugm.ac.id/2015/09/22/tot-peningkatan-kompetensi-mengajar-bagi-dosen-dan-guru-yang-responsif-gender-gelombang-ke-2/> diakses 18 Agustus 2023, pukul 20.33 wib

*Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*



Penegelolaan pendidikan belum sepenuhnya dilaksanakan ke arah adil gender atau memberikan peluang yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Oleh karena itu perlu peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan agar lebih menjamin semua warga negara baik laki-laki maupun Perempuan dapat mengakses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif, dan mempunyai control serta mendapat manfaat dari Pembangunan pendidikan, sehingga laki-laki dan perempuan dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.

Konsep penting yang perlu dipahami dalam membahas hubungan kaum perempuan dan laki-laki adalah membedakan antara konsep jenis kelamin (*sex*) dan konsep gender. Pemahaman dan perbedaan antara kedua konsep tersebut sangat diperlukan dalam melakukan analisis untuk memahami persoalan ketidakadilan sosial yang menimpa kaum perempuan. Hal ini disebabkan karena ada kaitan erat antara perbedaan gender (*gender differences*) dan ketidakadilan gender (*gender inequalities*) dengan struktur ketidakadilan masyarakat secara luas. Pemahaman atas konsep gender sangat diperlukan mengingat dari konsep ini telah lahir suatu analisis gender, lebih tepatnya analisis gender adalah memilah kekuatan yang menciptakan atau melanggengkan ketidakadilan dengan mempertanyakan siapa berbuat apa, siapa memiliki apa, siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan, siapa yang memutuskan, laki-laki atau perempuan?<sup>19</sup>

Kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, bukan berarti memposisikan laki-laki dan perempuan harus diperlakukan sama. Memperlakukan laki-laki dan perempuan secara sama dalam semua keadaan justru menimbulkan bias gender. Memperlakukan sama antara laki-laki dan perempuan dalam kerja rumah tangga pada satu keadaan, misalnya, suami juga berkewajiban mengurus anaknya, sama halnya isteri memiliki kewajiban mengurus anaknya. Artinya, kewajiban mengurus anak tidak mutlak menjadi kewajiban isteri semata, tetapi merupakan kewajiban bersama. Islam memandang kaum perempuan sejajar dengan laki-laki dalam potensi intelektualnya, mereka dapat berpikir, mempelajari kemudian mengamalkan segala hal yang dihayati dari dzikir pada Allah Swt. serta yang dipikirkan dari alam raya ini.

Pendidikan juga merupakan kunci terwujudnya keadilan gender dalam masyarakat, karena di samping merupakan alat untuk mentransfer norma-norma masyarakat, pengetahuan dan kemampuan manusia, juga sebagai alat untuk mengkaji dan menyampaikan ide-ide dan nilai baru. Dengan demikian, lembaga pendidikan merupakan sarana formal untuk sosialisasi sekaligus transfer nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat, termasuk nilai dan norma gender. Nilai dan norma tersebut ditransfer secara lugas maupun secara tersembunyi, baik melalui buku-buku teks yang digunakan maupun pada suasana dan proses pembelajaran. Pendekatan gender dalam pendidikan merujuk pada integrasi pemahaman yang holistik tentang peran gender, kesetaraan, dan keragaman dalam seluruh aspek pendidikan. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, yang menghormati dan memperhatikan

---

<sup>19</sup>Umi Hanik, *Skripsi, Kurikulum Perspektif Gender*, (Studi Kasus di Institut Studi Islam Fahmina Cirebon)



perbedaan gender serta mendorong kesetaraan hak dan peluang bagi semua individu, tanpa memandang gender.

### **Integrasi Konsep Gender dalam Kurikulum PTKIS**

Dalam mewujudkan pendidikan adil gender komitmen pemerintah menuangkan berbagai macam regulasi salah satunya dengan peraturan menteri pendidikan Nomor 84 Tahun 2008, tentang pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan. Pada Permendiknas tersebut dinyatakan bahwa setiap satuan uniy kerja bidang pendidikan yang melakukan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari seluruh kebijakan dan program pembangunan bidang pendidikan agar mengintegarisikan gender di dalamnya. Berdasarkan pasal tersebut tidak ada lagi alasan bagi stakeholders pendidikan untuk mengabaikan integrasi keadilan dan kesetaraan gender dalam pembangunan pendidikan.<sup>20</sup>

Hal ini sesuai dengan pendapat Dr Phil Syafiq Hasyim yang berpendapat bahwa kesetaraan gender merupakan amanat Presiden dan undang-undang yang harus diperjuangkan serius oleh sivitas seperguruan tinggi yang juga yang harus diperjuangkan oleh para sivitas akademika di lingkungan PTKIS. Namun demikian pada kenyataannya, kesenjangan gender bidang pendidikan masih terjadi. Beberapa kesenjangan gender yang ada antara lain: pertama, materi bahan ajar pada umumnya masih bias gender; kedua, proses pembelajaran di kelas belum sepenuhnya mendorong partisipasi aktif secara seimbang antara siswa laki-laki dan perempuan; dan ketiga, lingkungan fisik sekolah belum menjawab kebutuhan spesifik anak laki-laki dan perempuan; Keempat, Pengelolaan pendidikan belum sepenuhnya dilaksanakan ke arah adil gender atau memberikan peluang yang seimbang bagi laki-laki dan perempuan untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Untuk itu, peningkatan kesetaraan dan keadilan gender di bidang pendidikan sangat penting untuk dilakukan agar lebih menjamin semua warga negara baik laki-laki maupun perempuan dapat mengakses pelayanan pendidikan, berpartisipasi aktif, dan mempunyai kontrol serta mendapat manfaat dari pembangunan pendidikan, sehingga laki-laki dan perempuan dapat mengembangkan potensinya secara maksimal.

Sistem pendidikan nasional merupakan perpaduan dari beberapa elemen, baik yang menyangkut sarana pendidikan, para pendidik, masyarakat yang dididik, kurikulum (baik kurikulum nasional maupun kurikulum lokal) dan dana Pendidikan. Kurikulum merupakan Kumpulan mata Pelajaran yang harus disampaikan guru atau dipelajari oleh siswa.<sup>21</sup> Anngapan ini sejak zaman Yunnai Kuno sudah ada. Saat ini pandangan klasik ini masih dipakai “... *a racecourse of subject matters to be mastered*”.(Robert S. Azia, 1976) Ada pendapat mengatakan bahwa kurikulum: “*a course, as a specific fixed course of study, as in school or college, as one leadang to a degree*”.<sup>22</sup>

Al Shaybani dikutip Hasan Langgulung menyatakan bahwa kurikulum merupakan sejumlah pengalaman Pendidikan, kebudayaan , social , olahraga dan kesenian yang

---

<sup>20</sup> <https://psw.ugm.ac.id/2015/09/22/tot-peningkatan-kompetensi-mengajar-bagi-dosen-dan-guru-yang-responsif-gender-gelombang-ke-2/> dikases 18 Agustus 2023, pukul 20.33 wib

<sup>21</sup> Sukmadinata, 2000,

<sup>22</sup> Webster, 1993



disediakan oleh sekolah bagi murid-murid di dalam dan diluar sekolah dengan maksud menolongnya untuk berkembang menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan.<sup>23</sup> Dalam hal ini al-Shaybani sebagaimana dikutip Hasan Langgulung mengatakan: Kurikulum adalah sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, sosial, olahraga, dan kesenian yang disediakan oleh sekolah bagi murid-murid di dalam dan di luar sekolah dengan maksud menolongnya untuk berkembang menyeluruh dalam segala segi dan merubah tingkah laku mereka sesuai dengan tujuan-tujuan pendidikan.

Mauritz Johnson dalam pendapatnya mengatakan bahwa pengalaman hanya akan muncul apabila terjadi interaksi antara siswa dengan lingkungannya. Interaksi tersebut bukan kurikulum namun pengajaran. Kurikulum hanya menggambarkan atau mengantisipasi hasil dari pengajaran. Johnson membedakan dengan tegas antara kurikulum dengan pengajaran. Semua yang berkenaan dengan perencanaan dan pelaksanaan, seperti perencanaan isi, kegiatan belajar -mengajar, evaluasi, termasuk pengajaran. Sedangkan kurikulum hanya berkenaan dengan hasil-hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh siswa. Menurut Johnson kurikulum adalah ... a *structured series of intended learning*.<sup>24</sup>

Sedangkan kurikulum berperspektif gender memberikan kesempatan kepada semua peserta didik tanpa diskriminasi dalam memperoleh pengalaman belajar sebagaimana yang tercantum dalam kurikulum yang berlaku. Semua mahasiswa diberi hak, tanggungjawab, kesempatan, perlakuan dan penilaian yang sama dalam proses pembelajaran. Sedangkan Kurikulum dalam arti luas dan modern bukan sekedar sejumlah mata pelajaran, tetapi mempunyai cakupan pengertian yang lebih luas. Yakni, sesuatu yang nyata terjadi dalam proses pendidikan. Pendapat para ahli di bawah ini mencerminkan pengertian kurikulum di atas, antara lain: Ronald Doll<sup>25</sup> mengemukakan bahwa kurikulum ... *all the experiences which are offered to learners under the auspices or direction of the school*. Kurikulum meliputi semua pengalaman yang disajikan kepada murid di bawah bantuan atau bimbingan sekolah.

### **Peran Dosen dalam Menyebarkan Pendidikan Gender**

Dosen merupakan tenaga pendidik dalam suatu perguruan tinggi. Kualitas dari seorang dosen akan menentukan bagaimana kualitas dari mahasiswa perguruan tinggi tersebut sehingga pada akhirnya akan menentukan bagaimana kualitas dari perguruan tinggi itu sendiri. Keberhasilan kinerja seorang dosen dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi. Peraturan Pemerintah (PP) nomor 60/1999 tentang Pendidikan Tinggi menjelaskan bahwa dosen merupakan tenaga pendidik atau kependidikan pada perguruan tinggi yang khusus diangkat dengan tugas utama mengajar. Dosen sebagai unsur pelaksana akademik jurusan merupakan bagian

---

<sup>23</sup> Langgulung, *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologik dan Pendidikan*, (Jakarta: Pustaka al-Husna, 1989).

<sup>24</sup> Mauritz Johnson, *Intentionality in Education*. New York: Center for Curriculum Research and Services, 1976.

<sup>25</sup> Ronald Doll, *Curriculum Improment Decision Making and Process*. t.tp.: Ally and Bacon, 1974.



dari perguruan tinggi, dimana menurut Undang-undang nomor 20/2003 pasal 20 dijelaskan bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ketiga hal tersebut dikenal dengan tri dharma perguruan tinggi.<sup>26</sup>

Pekerjaan di bidang pendidikan bagi Perempuan merupakan salah satu pilihan terbaik untuk mengaktualisasikan dirinya atas ilmu yang dimiliki selain itu juga mampu mandiri secara ekonomi. Hal tersebut menjadikan perempuan yang mengajar di tingkat pendidikan tinggi semakin tinggi tiap tahunnya dan semakin banyak perempuan menjadi dosen sebagai profesi. Perguruan Tinggi sebagai salah satu lembaga pendidikan yang tertinggi dalam dunia informal merupakan tempat yang terbaik bagi perempuan Indonesia mengembangkan dirinya baik secara kelimuan tanpa melupakan keluarganya. Pilihan ini jatuh di sektor pendidikan karena banyaknya perempuan tidak bisa meninggalkan terlalu lama anak-anaknya di rumah walaupun adanya pengasuh bagi buah hati mereka. Hal tersebut terjadi karena ada sikap tanggungjawab dan pengabdian seorang ibu dan istri untuk rumah tangganya, walaupun berpendidikan tinggi. Dalam hal ini dosen bukan tanpa sebab dosen yang mengajar diwajibkan memiliki pendidikan minimal strata dua alias pendidikan magister atau master, yang artinya pendidikan ini bisa optimal dimanfaatkan jika berada di dunia pendidikan yang memang mengharapkan demikian sebagai mana dalam undang-undang No.14 tahun 2005 pasal 46, tentang guru dan dosen yang menyebutkan bahwa dosen memiliki kualifikasi akademik minimal adalah lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana dan lulusan program doktor untuk program pascasarjana. Dalam menentukan kualitas sebuah perguruan tinggi dalam hal ini PTKIS harus dilihat dari faktor-faktor yang berperan terutama dalam pelaksanaan pendidikan di PTKIS tersebut. Tenaga kerja yang profesional sangat dibutuhkan dalam pengelolaan PTKIS mulai dari *top management* sampai dengan *lower management*, seperti halnya pada pelaksanaan akademik maupun pegawainya. Kinerja yang dilakukan oleh pegawai tersebut sangat menentukan kualitas dari PTKIS itu sendiri. Hasil kerja, prestasi kerja, atau kinerja merupakan istilah lain dari *performance*.<sup>27</sup>

Menurut Mondy (1993) kerja adalah hasil dari kontribusi seseorang atau kelompok dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Dari penelitian yang dilakukan oleh Setyowati<sup>28</sup>, T.L.A.D dan Arisanti, A.T (2015) diungkapkan bahwa adanya keinginan perempuan untuk terlibat dalam dunia kerja dan memilih sebagai dosen di dominasi oleh beberapa faktor, yaitu karena faktor tingkat pendidikan, kebutuhan untuk aktualisasi diri, dan faktor ekonomi. Dan alasan keterlibatan dosen perempuan dalam jabatan struktural lebih pada kebutuhan mengaktualisasikan diri. Sejumlah pendekatan seperti *timebased conflict*, *strain-based conflict*, serta *behavior-based conflict* digunakan untuk mengatasi *women family conflict* pada dosen perempuan.. Sedangkan *problem focused* dan *emotion*

---

<sup>26</sup> Mardatillah, Aktualisasi Diri Dosen Perempuan, Psikoborneo, *Jurnal Imiah Psikologi* No.2 Vol.9, Juni 2021,h.452.

<sup>27</sup> Mardatillah, Aktualisasi Diri Dosen Perempuan, Psikoborneo, *Jurnal Imiah Psikologi* No.2 Vol.9, Juni 2021,h.452.

<sup>27</sup>

<sup>28</sup> Mardatillah, Aktualisasi Diri Dosen Perempuan, Psikoborneo, *Jurnal Imiah Psikologi* No.2 Vol.9, Juni 2021,h.453.



focused yang dilakukan secara pribadi maupun melibatkan orang lain merupakan strategi yang biasa digunakan dalam mengatasi *women family conflict* yang terjadi. Hal ini juga diungkapkan bahwa perempuan berperan ganda sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga mempunyai latar belakang yang berbeda dalam bekerja. Perempuan yang mempunyai latar belakang pendidikan tinggi dapat mengaktualisasikan dirinya dengan sangat baik namun tidak minimal dalam mengurus rumah tangga titik berat sebaliknya perempuan yang bekerja karena ekonomi tidak dapat menikmati pekerjaannya tetapi dapat mengaktualisasikan dirinya dengan mengurus rumah tangga. sebaliknya perempuan yang bekerja karena ekonomi tidak dapat menikmati pekerjaan tetapi dapat mengaktualisasikan dirinya dengan mengurus rumah tangga dengan baik.<sup>29</sup>

Menurut Dirjen Sumber Daya Iptek Dikti, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (kemenristekdikti) jumlah dosen Indonesia ada sekitar 285.273 orang dengan rincian 162.016 dosen laki-laki dan 123.257 dosen perempuan, meski jumlah dosen laki-laki banyak dari perempuan namun untuk tren dosen usia muda yakni dibawah usia 40 tahun didominasi perempuan. Khusus dosen perempuan yang berusia 25-34 tahun berjumlah 50.000 an, sedangkan jumlah dosen laki-laki di usia yang sama berjumlah 40.000-an.<sup>30</sup>

Kajian gender di PTKIS akan berkembang cepat apabila dilakukan kebijakan-kebijakan diantaranya: pertama, ditumbuhkembangkannya *positive policy pada the ruler point* terhadap gender mainstreaming. Dengan demikian wacana tentang gender tidak sekedar berada pada kalangan segelintir *academical grass roots*. Namun justru menjadi kebijakan Lembaga pendidikan secara otoritatif yang didukung sekaligus ditumbuhkembangkan oleh pihak sivitas akademika. Kedua, melakukan kerjasama yang baik secara insidental, terutama kerjasama permanen *partnership* antar lembaga untuk menjadikan gender *mainstreaming* guna mewujudkan pemahaman lebih *survivable* dan lebih baik tentang gender dengan segala dinamikanya. Ketiga, mendukung sepenuhnya studi para tenaga pendidikan terhadap dinamika gender baik dalam bentuk penelitian maupun pengabdian masyarakat.

Keempat, PTKIS dalam hal ini perlu memberikan dukungan penuh terhadap badan otonom yang mengurus persoalan gender yakni pusat studi Wanita dengan membedakan *empowerment* baik dukungan pelaksanaan dan mutu kegiatannya melalui pemberian dukungan finansial yang memadai. Kelima, membuat mata kuliah baru yang berbasis gender *focused* tersendiri sebagai mata kuliah otonom baik dalam rumpun ilmu social dan ilmu keagamaan sebagai matakuliah umum lintas program studi sehingga pendekatan yang dipilih tidak lagi *additive approach* tetapi *contributinal approach* yang akhirnya dapat mengantarkan pada *transformation approach* bahkan *social action approach*.<sup>31</sup>

---

<sup>29</sup> Mardatillah, Aktualisasi Diri Dosen Perempuan, Psikoborneo, *Jurnal Imiah Psikologi* No.2 Vol.9, Juni 2021, h.454.

<sup>30</sup> [pddikti.kemdikbud.go.id/dosen](http://pddikti.kemdikbud.go.id/dosen),

<sup>31</sup> Edi Susanto, Sensitivitas Gender Dalam Mata Kuliah Ilmu Sosial Keagamaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, Nuansa, *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial & Keagamaan STAIN Pamekasan*, Vol. II, No. 2 Juli-Desember 2006. Hlm. 113-114.



## Penerapan Pendidikan Gender dalam Kehidupan Kampus PTKIS

Perguruan Tinggi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pendidikan. Disana mahasiswa dituntut untuk aktif dalam berbagai kegiatan terutama yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Perguruan Tinggi yang bergerak dibidang keagamaan tentunya lebih banyak menstimulasi mahasiswanya untuk berkegiatan yang mengandung nilai agama. Menjadi menarik bila di dalam mata kuliah sebuah perguruan tinggi terdapat mata kuliah pendidikan perspektif gender. Hanya sayangnya mata kuliah ini merupakan mata kuliah pilihan, sehingga tidak semua perguruan tinggi dan program studi memilih mata kuliah ini karena masih banyak warga kampus yang mempertanyakan urgensi mata kuliah gender bagi mahasiswa yang dianggap sebagai “pelajar dewasa” yang berusia diatas 17 tahun dan dianggap telah memiliki sikap dan prilaku baik karena telah mengenyam bangku sekolah belasan tahun. Apalagi para pengajar di perguruan tinggi adalah manusia yang mapan dalam pendidikan hingga ke jenjang strata dua atau tiga. Persoalannya adalah masih banyak yang bertanya mengenai arah pendidikan perspektif gender di kampus terutama kampus Islam swasta yang seringnya dikaitkan dengan pemahaman keagamaan yang mereka miliki dan selalu dikaitkan dengan dalil yang mereka pahami secara sempit. Belum lagi pertanyaan mengenai keterkaitan antara pendidikan perspektif gender dengan gerakan keagamaan yang selama ini dilakukan oleh mahasiswa perguruan tinggi keagamaan Islam swasta.

Jika ditela’ah ketidakadilan gender dalam pendidikan sering kali muncul melalui beberapa aspek. Aspek yang banyak kita temukan adalah pada aspek kurikulum. Dalam kurikulum pendidikan di Indonesia, sektor publik selalu diperuntukkan dan dikembangkan untuk laki-laki sedangkan perempuan hanya dikait-kaitkan dengan sektor domestik. Seolah secara sadar kurikulum tersebut memupuk pola pikir peserta didik bahwa beberapa ranah tertentu tidak bisa dikuasai oleh perempuan. Terkait erat dengan aspek kurikulum adalah penjabaran atau penjelasan terhadap mata pelajaran seringkali dijelaskan dengan kalimat yang bias gender, termasuk juga didalamnya gambar-gambar yang tercetak dalam buku-buku teks pelajaran di sekolah.<sup>32</sup>

Aspek lainnya yaitu aspek kesempatan bagi perempuan. Melihat kondisi wilayah di Indonesia yang beberapa diantaranya memiliki territorial yang sulit dijangkau atau menjangkau cakrawala dunia luar yang erat dengan kemajuan, maka kesempatan anak perempuan untuk ikut andil dalam dunia pendidikan semakin kecil. Dalam pola pikir masyarakat tradisional, lebih baik anak perempuan mereka tidak sekolah dari pada harus pergi jauh dari pandangan mata mereka hanya untuk mengenyam bangku sekolah yang belum tentu bisa menghasilkan sesuatu yang positif.

Bentuk ketidakadilan gender lain kerap dimunculkan pada aspek jurusan atau program studi. Dalam pembangunan pendidikan masih terjadi gejala pemisah gender (*gendersegregation*) dalam jurusan atau program studi sebagai salah satu bentuk diskriminasi gender secara sukarela “*voluntarily dicriminatioan*” kedalam bidang keahlian dan selanjutnya pekerjaan yang berlainan. Hal ini disebabkan oleh nilai dan sikap yang dipengaruhi faktor-faktor sosial budaya masyarakat yang secara melembaga telah memisahkan gender ke dalam peran-peran sosial yang berlainan. Pemilihan jurusan-

---

<sup>32</sup> Maqbulah, Pendidikan Dalam Perspektif Gender, Jurnal Edu Power,  
*Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*



jurusan bagi anak perempuan lebih dikaitkan dengan fungsi domestik, sementara itu anak lelaki diharapkan berperan dalam menopang ekonomi keluarga sehingga harus lebih banyak memilih keahlian-keahlian ilmu kerar, teknologi dan industry.<sup>33</sup>

### **Kebijakan Inklusifitas Gender di Lingkungan Kampus PTKIS**

Sebelum memasuki pembahasan lebih jauh, mengetahui makna dari inklusifitas adalah hal yang niscaya agar pada penjelasan berikutnya dapat dipahami maksud dan tujuan pembahasan ini. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), inklusif yaitu termasuk atau terhitung. Namun dalam konteks yang lebih luas, penggunaan kata inklusif dan eksklusif lebih dari itu. Definisi kamus tentang inklusif adalah sesuatu yang tidak meninggalkan siapa pun, bagian atau kelompok. Itu berarti bila didalam suatu organisasi menetapkan suatu aturan baku, maka seluruh unsur dan organ yang terlibat didalamnya diharuskan mengikuti aturan yang telah disepakati tersebut. Dalam pelaksanaan inklusifitas gender di lingkungan perguruan tinggi terutama perguruan tinggi Islam swasta, hal ini tidaklah mudah karena kadang budaya patriaki lebih kuat digenggam oleh masyarakat agamis dengan mengatasnamakan dalil. Seringkali agama dijadikan tameng penolakan terhadap “budaya baru” yang mempersamakan hak kaum perempuan terhadap kaum lelaki. Ketimpangan gender di perguruan tinggi sangat kental sehingga perlu adanya pemberian kesadaran kepada warga kampus secara berkesinambungan.

Asumsi dasar untuk melacak ketimpangan gender adalah melihat relasi kekuasaan antara laki-laki dan perempuan. Laki-laki diasumsikan memiliki kekuasaan yang lebih tinggi sehingga diposisikan lebih superior dibandingkan perempuan. Relasi ini kemudian dilanggengkan dalam masyarakat dengan menilai budaya patriarki yang kuat. Patriarki sendiri merupakan sebuah sistem di mana laki-laki mendominasi dan menguasai aspek kehidupan sehingga bentuk penomorduaan pada perempuan dianggap sebagai hal yang wajar oleh masyarakat.<sup>34</sup>

Pengarusutamaan gender merupakan suatu strategi dalam rangka meningkatkan kedudukan peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pengarusutamaan gender dilaksanakan dalam seluruh proses pembangunan nasional. Sebagai proses yang berlangsung dalam seluruh proses pembangunan maka pengarusutamaan gender merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak terkecuali lembaga perguruan tinggi yang ada di negeri ini.

Dalam hal ini perlu adanya regulasi yang mengatur pelaksanaan keadilan gender di perguruan tinggi Islam swasta dan ini dibuat terstruktur dan menyeluruh sehingga hasil yang dicapai dapat terukur. Pola yang dibangun adalah dengan menerapkan aturan tertulis maupun tidak tertulis yang menunjukkan keberpihakan kampus terhadap kepentingan perempuan. Dimulai dari yang sifatnya umum seperti struktur kepemimpinan sampai yang

---

<sup>33</sup> Maqbulah, Pendidikan Dalam Perspektif Gender, Jurnal Edu Power,

<sup>34</sup> Hannam, dalam Fatmawati dan I.A. Indriyani, M.D. Hikmawan dan W.K. Utami, Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi Tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender, *JIIIP, Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan*, No.1 Vol.6, 2021, hlm 55-72.



sifatnya pribadi seperti penggunaan ruang-ruang kampus diantaranya ruang toilet dan lain-lain. Minimnya representasi perempuan pada jabatan struktural pimpinan perguruan tinggi ini menyiratkan asumsi bahwa perempuan dianggap tidak memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin. Apalagi ditambah dengan akses yang tertutup akibat konstruksi sosial maupun pengkondisian lingkungan yang tidak memberikan kesempatan bagi perempuan untuk menduduki jabatan tertinggi. Konstruksi sosial terhadap perempuan ini terkait dengan kodrat yang selama ini melekat pada perempuan bahwa perempuan dianggap hanya bisa menyelesaikan urusan domestik.<sup>35</sup>

Dalam hal ini Kementerian Agama melalui Ditjen Pendidikan Islam akan memperkuat program responsif gender di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI). Dalam RPJMN, pengarusutamaan gender merupakan salah satu prioritas nasional. Karena itu, pengembangan program responsive gender di lingkungan PTKI menjadi salah satu upaya penerjemahan dari amanat pemerintah. Menurut Ishom, pengembangan program responsif gender di lingkungan perguruan tinggi Keagamaan Islam (PTKI) juga menjadi salah satu upaya untuk memutus mata rantai budaya bias gender. Dalam hal ini difokuskan pada tiga isu atau kebijakan nasional terkait pengarusutamaan gender yaitu peningkatan kualitas hidup dan peran Perempuan dalam Pembangunan, perlindungan Perempuan terhadap berbagai tindak kekerasan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan pemberdayaan Perempuan. Selain itu langkah afirmatif dalam peningkatan program responsive gender pentingnya penguatan regulasi, struktural, dan kebebasan mimbar akademik dosen yang adil dan setara. Selain itu setiap studi gender dan anak di lingkungan PTKI harus memiliki jejaring yang luas sehingga bisa menjadi mitra dalam melaksanakan program dan kegiatan yang dilakukan.<sup>36</sup>

### **Pencegahan Pelecehan dan Kekerasan Berbasis Gender di Kampus PTKIS**

Istilah pelecehan sosial seksual terbagi dalam beberapa bentuk yang dikelompokkan ke dalam lima bentuk pelecehan yaitu: pertama, pelecehan fisik, Perbuatan yang termasuk dalam kategori pelecehan fisik adalah perhatian yang tidak diinginkan yang disampaikan dengan cara bersentuhan secara fisik yang mengarah ke perbuatan seksual seperti rabaan ataupun pandangan penuh pada bagian badan seolah sedang menelanjangi fisik lawan jenis. Kedua, pelecehan lisan, berupa panggilan lelucon maupun komentar yang tidak diinginkan seperti bernada seksual tentang pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seorang dikategorikan sebagai suatu pelecehan lisan atau verbal. Ketiga, Pelecehan isyarat, berupa bahasa tubuh atau gerakan tubuh bernada seksual seperti kerlingan mata yang dilakukan berulang kali juga isyarat dengan jari serta menjilat bibir dengan maksud seksual dikategorikan ke dalam pelecehan isyarat.

Keempat, pelecehan tertulis atau gambar. Dalam hal yang terkait dengan pelecehan tertulis atau gambar merupakan pelecehan dengan cara mempertontonkan pornografi seperti foto, video, screensaver, poster seksual atau pelecehan lewat email dan sarana komunikasi lainnya. Kelima, pelecehan psikologis atau emosional yaitu pelecehan berupa

---

<sup>35</sup> Alfirahmi, 2018

<sup>36</sup> Kementerian Agama, Kemenag Perkuat Program Responsif Gender di PTKI, Artikel dari <https://kemenag.go.id/nasional/kemenag-perkuat-program-responsif-gender-di-ptki-mgsc5b>, diakses 21 Agustus 2024, pukul 3.36 wib.



permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus-menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan serta penghinaan atau celaan yang bersifat seksual merupakan suatu pelecehan psikologis atau emosional.<sup>37</sup>

Perempuan dan hak-haknya sering menjadi objek pelecehan dan mereka tidak berdaya menghadapi secara individual baik itu merupakan kekuatan kultural maupun struktural yang notabene laki-laki sering dibenarkan oleh kultur dan budaya karena memiliki kekuasaan. Nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kesuciannya pada kenyataannya dianggap sebagai sesuatu yang remeh sehingga dengan mudahnya dinodai oleh naluri kebinatangan yang dilakukan oleh lelaki yang berlaku sebagai “penguasa”. Kekerasan pelecehan dan eksploitasi seksual bukan menimpa perempuan dewasa saja tetapi juga perempuan yang tergolong di bawah umur atau anak-anak. Kejahatan seksual ini tidak hanya berlangsung di lingkungan perusahaan, perkantoran atau di tempat-tempat tertentu bahkan di lingkungan kampus pun dapat terjadi kejahatan seksual yang korbannya merupakan mahasiswa-mahasiswi.<sup>38</sup>

Rektor Universitas Riau, Prof. Dr. Sri Indiarti, SE., M.SI dalam pidatonya saat membuka acara Sosialisasi Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 lalu menyampaikan tentang tiga hal yang menjadi tantangan bagi pendidikan di Indonesia adalah intoleransi, perundungan dan kekerasan seksual. Dampak dari kondisi semacam itu selain menghambat terwujudnya lingkungan yang tidak baik juga akan memberikan trauma bagi korban dan akan membuat citra negatif bagi dunia pendidikan.

Pencegahan agar tindakan kekerasan dan pelecehan seksual dapat diminimalisir di dunia pendidikan diantaranya dengan: pertama, menyamakan persepsi mengenai pencegahan dan penanganan kekerasan seksual yang terdapat dalam Permendikbud Nomor 30 Tahun 2021. Harus ada komitmen dari seluruh warga dan stake holder untuk menjadikan kampus sebagai tempat yang nyaman untuk belajar, sehat, dan aman.<sup>39</sup> Unsur lain yang mesti diperhatikan oleh PTKIS diantaranya adalah kedua, konseling. Ini perlu dikuatkan perannya sebagai tempat pendidikan dan penguatan moral. Ketiga, adanya pengawalan dan perhatian terhadap lingkungan serta komunikasi yang baik antar warga kampus, diharapkan kekerasan seksual bisa dicegah secara preventif.

### **Partisipasi Aktif Mahasiswa dalam Kesetaraan Gender**

Mahasiswa sebagai duta negara dalam bidang pendidikan harus segera melakukan pembongkaran bias gender, dilakukan mulai dari pribadi dan rumah tangga masing-masing hingga sampai pada kebijakan pemerintah yang tertuang dalam undang-undang, tafsir agama dan epistemologi ilmu pengetahuan. Untuk itu berbagai aksi mahasiswa menjawab tantangan strategis perlu dilakukan seperti melakukan kampanye keberpihakan terhadap perempuan, pendidikan gratis, advokasi untuk merubah kebijakan pemerintah yang ambigu, tafsir ulang terhadap wacana keagamaan yang dalam penafsirannya sedikit

---

<sup>37</sup> IAA Dewi, “Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual”, *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2 Agustus 2019, h. 198 – 212.

<sup>38</sup> Sumera 2013 dalam Fajarini & Handayani, *Jurnal Harkat, Media Komunikasi Gender*, 17 (1), 2021, 49-66 <http://jurnal.uinjkt.ac.id/index.php/psga>

<sup>39</sup> Mukmin, <https://unri.ac.id/pentingnya-tindakan-preventif-kekerasan-seksual/2023>.

*Tadbiruna: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*



memarjinalkan hak kaum perempuan, serta memberi ruang epistemologi perspektif feminis untuk memberikan makna terhadap realitas dunia.<sup>40</sup>

Mahasiswa harus mampu membawa perubahan terutama merubah pola fikir warga perguruan tinggi keagamaan Islam melalui diskusi dan kajian terhadap tafsir alquran yang sering dijadikan dalil memarjinalkan kaum perempuan. Sebagai pelaksana Tri Dharma Perguruan Tinggi yang berwawasan maju menuju Indonesia Emas 2045 dengan bonus demografinya saat mereka terjun ke masyarakat kelak mahasiswa diharapkan mampu memberikan estafet pemikiran yang baik kepada penerus mereka kelak. Masa depan Indonesia berada ditangan mahasiswa saat ini. Perbedaan hak lelaki dan perempuan diharapkan selesai hingga pada masanya nanti. Lelaki dan perempuan saling tolong menolong membahu mensukseskan program pendidikan perspektif gender di kampus hingga pada lingkungan yang lebih besar dengan melibatkan seluruh mahasiswa secara aktif dan kontinyu.

Dalam setiap kegiatan mahasiswa diarahkan untuk selalu berwawasan gender dengan melibatkan mahasiswi (perempuan) dan ditempatkan di posisi penting dalam Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) serta kepanitiaan misal sebagai ketua panitia atau posisi lain yang berspektif gender. Penggunaan ruang-ruang public di kampus yang berkeadilan gender serta komunikasi yang baik antara seluruh warga kampus (mahasiswa, dosen, karyawan / tenaga kependidikan hingga penjaga kantin maupun security (satpam) akan sangat membantu mensukseskan program pendidikan perspektif gender di perguruan tinggi keagamaan Islam swasta (PTKIS).

## **SIMPULAN**

Pengaruh utamaan gender di Indonesia sudah mulai meningkat meski masih butuh perjuangan yang berat untuk mencapai penyeteraan hak kaum perempuan terutama dibidang pendidikan. Capacity building yang dibangun oleh seluruh organ masyarakat pendukung keadilan gender serta advokasi untuk mereka yang termarjinalkan yaitu kaum perempuan harus segera direalisasikan tanpa menunggu waktu yang berlarut-larut. Pada masa Indonesia Emas 2045 diharapkan sudah tidak ada lagi perdebatan mengenai tafsir pemahaman terhadap pendidikan perspektif gender. Bonus demografi yang dimiliki Indonesia saat itu adalah sebuah anugerah dari Yang Maha Esa yang akan membawa Indonesia maju dan sukses. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS) diharapkan menjadi pelopor kesuksesan Indonesia kedepan dan mahasiswa saat ini merupakan pilar yang kokoh dalam menopang kesuksesan tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Achmad, Syaefudin. (2019). Membangun Pendidikan Berwawasan Gender. Jurnal YINYANG: Jurnal Studi Islam, Gender dan Anak, 14(1), 70-91.
- Anwar, S. S., Maskur, S., & Anwar, S. (Tahun tidak disebutkan). Pendidikan Gender dalam Pandangan Islam. PT Indragiri Dot Com, hlm 4.

---

<sup>40</sup> Maqbulah, ..h.16.



- Arinia, Ika Indriyany , M. Dian Hikmawan , Wahyu Kartiko Utami. ( 2021). Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender, *Dalam JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN* , Vol.6, No. 1, 2021, hlm.1.
- Doll,Ronald. (1974). *Curriculum Improment Decision Making and Process*. t.tp.: Ally and Bacon
- Dewi IAA. (2019). Catcalling : Candaan, Pujian atau Pelecehan Seksual”, *Acta Comitas : Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4 No. 2 Agustus 2019, hlm. 198 – 212.
- Erni, Agustina. (2019). Workshop Kemen PPPA *Rangkul Sivitas Perguruan Tinggi Wujudkan Kesetaraan Gender*, 7 Desember 2019, diakses tgl 14 Agustus 2023, 09.12 wib,
- Hasan, Chalijah. ( 1998). *Kajian Gender dan Perguruan Tinggi, dalam Perguruan Tinggi Islam di Era Globalisasi*, Syahrian Harahap (Ed.), IAIN Sumatera Utara Bekerjasama dengan Tiara Wacana Yogya, 1998, hlm. 193-194.
- Hanik,Umi. *Skripsi, Kurikulum Perspektif Gender*, (Studi Kasus di Institut Studi Islam Fahmina Cirebon)
- Hannam, dalam Fatmawati dan I.A. Indrivany,M.D. Hikmawan dan W.K. Utami, Gender dan Pendidikan Tinggi: Studi Tentang Urgensitas Kampus Berperspektif Gender, *JIIP, Jurnal Ilmiah Ilmu Pengetahuan*, No.1 Vol.6,2021, hlm 55-72.
- Johnson, Mauritz. ( 1976). *Intentionality in Education. New York: Center for Curriculum Research and Services*
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (Tahun 2003). Draf UU Nomor 20 Tahun 2003.
- Khotimah, Khusnul. (2008). Urgensi Kurikulum Gender dalam Pendidikan. *Jurnal Pemikiran Alternatif Pendidikan*, 13(3), 1-10.
- Kiram, Muhamamad Zawil. (2020). Pendidikan Berbasis Gender Dalam Keluarga Masyarakat Aceh. *Jurnal Community Pengawas Dinamika Sosial*, 6(2), 180-191.
- Langgulong.(1989) , *Manusia dan Pendidikan: Suatu Analisa Psikologik dan Pendidikan*. Jakarta: Pustaka al-Husna.
- Mulyono, Kajian Gender di Perguruan Tinggi Agama Islam, *Jurnal Egalita* Vol 1,No.2 ,2006.
- Mardatillah, Aktualisasi Diri Dosen Perempuan, *Psikoborneo, Jurnal Imiah Psikologi* No.2 Vol.9, Juni 2021,hlm.452.
- Mukmin. (2023), artikel dari. <https://unri.ac.id/pentingnya-tindakan-preventif-kekerasan-seksual>.
- Maqbulah, Pendidikan Dalam Perspektif Gender, *Jurnal Edu Power*, PDDIKTI Kemdikbud. (2020). Statistik PDDikti.
- Rahmah, S. (2019). Pendidikan dan Kesetaraan Gender dalam Islam di Aceh. *Gender Equality, International Journal Of Child And Gender Studies*, hlm. 25-42.
- Susanto, Edi. (2006). Sensitivitas Gender Dalam Mata Kuliah Ilmu Sosial Keagamaan di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan, Nuansa, *Jurnal Penelitian Ilmu-ilmu Sosial & Keagamaan STAIN Pamekasan*, Vol. II, No. 2 Juli-Desember 2006., hlm. 113-114.
- Sumera 2013 dalam Fajarini & Handayani, *Jurnal Harkat, Media Komunikasi Gender*, 17 (1), 2021, 49-66 <http://jurnal.uinjkt.ac.id/index.php/psga>  
<https://psw.ugm.ac.id/2015/09/22/tot-peningkatan-kompetensi-mengajar-bagi-dosen-dan-guru-yang-responsif-gender-gelombang-ke-2/> diakses 18 Agustus 2023, pukul 20.33 wib

